

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Kedaulatan Rakyat	16
1. Pengertian Kedaulatan Rakyat	16
2. Ajaran Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	23
3. Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia	27
B. Tinjauan Umum Pemilihan Umum	30
1. Pengertian Pemilihan Umum	30
2. Tujuan Pemilihan Umum	34
3. Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum.....	37
4. Pemilihan Umum Sebagai Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat	42
5. Penyelenggara Pemilu	48
1) Komisi Pemilihan Umum	49

2) Badan Pengawas Pemilu	53
3) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	55
C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	57
1. Kewenangan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	59
2. Kewenangan Mengadili Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	62
3. Kewenangan Memutus Pembubaran Partai Politik.....	67
4. Kewenangan Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum	69
5. Kewajiban Memutus Pendapat DPR Bahwa Presiden/Wakil Presiden Telah Melakukan Pelanggaran Tertentu Menurut UUD dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden Tidak Lagi Memenuhi Syarat	72
D. Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Islam.....	77
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Proses Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif Di Mahkamah Konstitusi	80
1. Pengajuan Permohonan	84
1) Pemohon.....	84
2) Pihak Terkait	88
3) Pencabutan Permohonan	89
2. Registrasi Perkara.....	89
1) Pencatatan Permohonan	89
2) Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan	90
3. Penjadwalan dan Pemanggilan Sidang.....	90
4. Pemeriksaan Perkara	91
1) Pemeriksaan Pendahuluan.....	91
2) Pemeriksaan Persidangan	91
5. Putusan	95
B. Kendala Dalam Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif Di Mahkamah Konstitusi Dan Solusinya	99
1. Batas Waktu Pendaftaran Permohonan	99
2. Batas Waktu Pemeriksaan Dan Pembuktian	101
BAB IV PENUTUP	104

A. Kesimpulan	104
B. Saran-Saran	104

DAFTAR PUSTAKA